

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 mempertimbangkan evaluasi capaian kinerja pembangunan ekonomi pada Tahun 2023 dan kondisi ekonomi pada awal tahun 2024. Selain itu arah kebijakan ekonomi daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 diselaraskan dengan kebijakan ekonomi nasional dan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026. Kebijakan ekonomi daerah disusun dengan tujuan untuk mengimplementasikan program serta mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi makro yang ada.

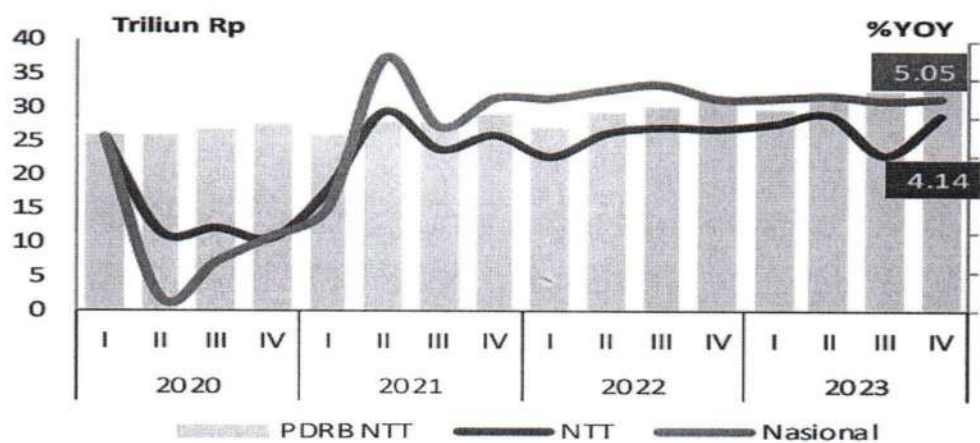
Kebijakan perekonomian Provinsi NTT dipengaruhi oleh dinamika perkembangan ekonomi nasional yang mempertimbangkan hasil analisis terhadap kinerja perekonomian nasional dan daerah tahun 2023. Analisis ekonomi daerah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah pada tahun 2025.

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa . Semakin besar pertumbuhan ekonomi tahunan menunjukkan semakin besar output barang dan jasa yang dihasilkan ekonomi daerah dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada Triwulan IV 2023 meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dan searah dengan kinerja perekonomian nasional. Perekonomian NTT pada triwulan IV mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,14% (yoy) meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,08% (yoy). Kondisi ini sejalan dengan perekonomian nasional yang tumbuh sebesar 5,05% (yoy), setelah tumbuh sebesar 4,94% (yoy) pada triwulan III 2023. Pertumbuhan ekonomi NTT pada triwulan IV 2023 tidak lepas dari percepatan kinerja penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) dan proyek peningkatan infrastruktur jalan daerah yang didanai melalui dana inpres.

Secara tahunan perekonomian Provinsi NTT Tahun 2023 mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,52 (ctc), kembali melanjutkan tren pertumbuhan pasca pandemi covid-19. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 didorong oleh pertumbuhan pada hampir seluruh komponen sisi lapangan usaha sejalan dengan aktivitas ekonomi yang meningkat. Di sisi lain, peningkatan pada sisi investasi dan konsumsi pemerintah untuk mendukung dalam percepatan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu faktor pendorong dalam pertumbuhan dan realisasi pendanaan dan penyerapan tenaga kerja.

Grafik 2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi NTT dan Nasional secara Triwulan Tahun 2023



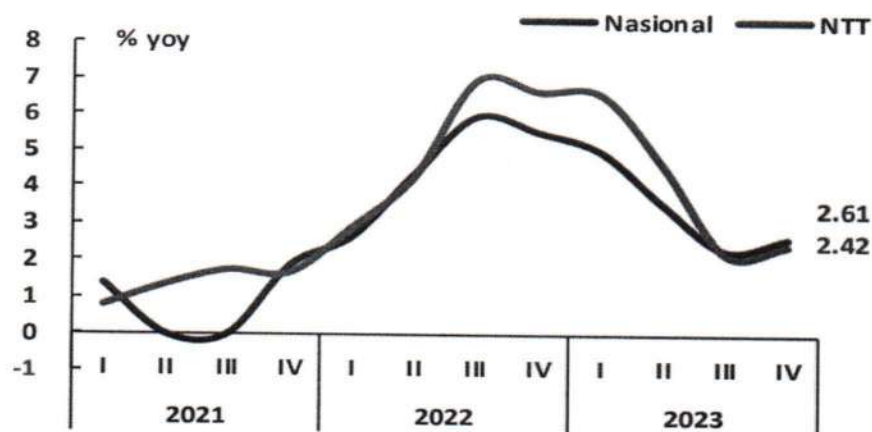
Sumber : Buku Laporan Perekonomian NTT, Februari 2024

2.1.2. Inflasi

Inflasi yang merupakan indikator pergerakan antara permintaan dan penawaran di pasar riil juga erat kaitannya dengan perubahan tingkat suku bunga, produktivitas ekonomi, nilai tukar rupiah dengan valuta asing, indeksasi upah/gaji, asumsi APBN dan sebagainya.

Inflasi gabungan 3 (tiga) kota yaitu Kota Kupang, Maumere dan Waingapu di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada triwulan IV 2023 tercatat sebesar 2,42% (yoy) meningkat dibanding dengan inflasi triwulan sebelumnya sebesar 2,19% (yoy). Tingkat inflasi tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,61% (yoy) dan rata-rata gabungan Provinsi NTT pada 3 (tiga) tahun terakhir sebesar 2,98% (average yoy). Secara spasial inflasi tertinggi dicatat oleh Kota Maumere yakni sebesar 3,33% (yoy) diikuti oleh Kota Waingapu sebesar 3,27% (yoy) dan Kota Kupang sebesar 2,21% (yoy).

Grafik 2.1.2. Perkembangan Inflasi Nasional dan Provinsi NTT Tahun 2021-2023



Sumber : Buku Laporan Perekonomian NTT, Februari 2024

Berdasarkan kelompok komoditas, inflasi di Provinsi NTT pada triwulan IV tahun 2023 terutama didorong oleh tekanan pada kelompok makanan, minuman dan tembakau yang mencatatkan inflasi sebesar 3,18% (yoy) atau lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya dan memberikan andil sebesar 1,07% pada total inflasi. Sementara itu, inflasi kelompok transportasi tercatat sebesar 4,12% (yoy) meningkat dibanding triwulan sebelumnya dan memberikan andil sebesar 0,64% terhadap inflasi total.

Tabel 2.1.2. Inflasi di Provinsi NTT Berdasarkan Kelompok Komoditas Tahun 2023

Kelompok Komoditas	(% mtm)			(% yoy)			andil yoy
	Okt '23	Nov '23	Des '23	Tw IV '22	Tw III '23	Tw IV '23	Tw IV '23
Inflasi Umum	0.42	0.37	0.39	6.65	2.19	2.42	2.42
Makanan, Minuman & Tembakau	0.38	0.73	0.78	7.52	4.03	3.18	1.07
Pakaian & Alas Kaki	0.03	-0.06	-0.11	0.84	0.50	0.30	0.02
Perumahan, Air, Listrik, & Bahan Bakar RT	-0.02	0.18	0.07	1.13	1.70	1.66	0.28
Perlengkapan, Peralatan, & Pemeliharaan Rutin RT	0.08	0.08	-0.06	4.91	1.17	0.69	0.03
Kesehatan	0.10	-0.03	-0.01	2.59	2.37	2.31	0.04
Transportasi	1.63	0.36	0.39	21.52	0.23	4.12	0.64
Informasi, Komunikasi & Jasa Keuangan	0.03	0.01	0.02	-0.58	-0.09	-0.02	-0.00
Rekreasi, Olahraga & Budaya	0.10	0.01	-0.16	2.20	-0.21	-0.48	-0.01
Pendidikan	0.00	0.00	0.00	1.76	1.34	0.22	0.01
Penyediaan Makanan & Minuman/Restoran	0.02	0.02	0.81	1.52	3.04	3.50	0.20
Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya	0.55	0.54	0.23	7.92	2.94	2.19	0.15

Sumber : Buku Laporan Perekonomian NTT, Februari 2024

2.1.3. Penduduk Miskin

Tingkat kemiskinan adalah presentase jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan yaitu minimum untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Tingkat kemiskinan dan ketimpangan merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan menekan laju pertumbuhannya menjadi salah satu tujuan pembangunan ekonomi.

Secara umum pada periode September 2012-Maret 2023 tingkat kemiskinan di Provinsi NTT mengalami fluktuasi baik dari sisi jumlah maupun persentase. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode September 2013, Maret 2015 dan September 2022 terjadi setelah adanya kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2020 dan September 2020 terjadi ketika ada pembatasan mobilitas penduduk saat pandemic covid-19 yang melanda Provinsi NTT.

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Maret 2024 mencapai 1,13 juta orang. Dibandingkan Maret 2023, jumlah penduduk miskin menurun 13,54 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan September 2022 jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 21,60 ribu. Persentase penduduk miskin pada Maret 2024 tercatat sebesar 19,48 persen menurun 0,48 persen poin terhadap Maret 2023 dan menurun 0,75 persen poin terhadap September 2022. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan periode Maret 2023 antara lain adalah sebagai berikut :

1. Selama periode September 2022-Maret 2023 Nusa Tenggara Timur mengalami inflasi sebesar 2,58 persen. Kelompok makanan, minuman dan tembakau mengalami inflasi sebesar 6,89 persen.
2. Inflasi di wilayah pedesaan yang dicerminkan dari perubahan indeks konsumsi rumah tangga pada periode September 2022-Maret 2023 tercatat sebesar 3,51 persen.

- Ekonomi Nusa Tenggara Timur triwulan I 2023 tumbuh sebesar 3,73 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022 (y-on-y). Dari sisi pengeluaran, tercatat komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan I 2023 tumbuh sebesar 2,55 persen.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2023 sebesar 3,10 persen turun sebesar 0,20 persen poin jika dibandingkan TPT Februari 2022.
- Membaiknya kondisi ketenagakerjaan juga tercermin dari peningkatan proporsi pekerja penuh pada Februari 2023 sebesar 51,06 persen atau meningkat dibandingkan dengan Februari 2022 (47,20 persen).

Pemerintah Pusat dalam Rancangan awal RKP Tahun 2025 menargetkan persentase kemiskinan Provinsi NTT Tahun 2025 sebesar 15,3-15,8 persen.

Tabel 2.1.3. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi NTT Tahun 2021-2023

Wilayah	2021		2022		2023	
	Jumlah (Ribuan Jiwa)	Persentase	Jumlah (Ribuan Jiwa)	Persentase	Jumlah (Ribuan Jiwa)	Persentase
Sumba Barat	37.78	28.39	37.06	27.47	37.15	27.17
Sumba Timur	78.33	29.68	75.28	28.22	75.66	28.08
Kupang	91.25	22.98	88.02	21.70	90.23	21.78
Timor Tengah Selatan	125.68	26.64	120.45	25.45	119.51	25.18
Timor Tengah Utara	58.33	22.62	55.88	21.50	57.19	21.85
Belu	35.41	15.68	33.98	14.84	33.19	14.30
Alor	43.83	21.09	42.30	20.25	41.91	19.97
Lembata	38.75	26.21	37.88	25.18	37.94	24.78
Flores Timur	28.90	11.14	28.08	10.75	30.93	11.77
Sikka	43.09	13.35	40.87	12.61	40.81	12.56
Ende	66.38	24.13	63.40	23.00	63.10	22.86
Ngada	20.98	12.58	20.14	11.93	20.57	12.06
Manggarai	71.03	20.48	69.68	19.84	70.00	19.69
Rote Ndao	51.71	28.08	52.43	27.45	53.55	27.05
Manggarai Barat	51.15	17.92	49.95	17.15	49.95	16.82
Sumba Tengah	25.48	34.27	24.49	32.51	24.24	31.78
Sumba Barat Daya	100.42	28.18	98.50	27.16	101.40	27.48
Nagekeo	19.11	12.91	18.01	12.05	18.57	12.33
Manggarai Timur	77.17	26.50	74.55	25.35	74.40	25.06
Sabu Raijua	30.60	30.13	30.00	28.73	30.43	28.37
Malaka	32.17	16.33	30.48	15.26	29.19	14.42
Kota Kupang	41.77	9.17	40.20	8.61	41.20	8.61
Nusa Tenggara Timur	1169.31	20.99	1131.62	20.05	1141.11	19.96

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), 2024

2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2023 sebesar 3,14 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 3 orang penganggur.

Pada Agustus 2023, TPT mengalami penurunan sebesar 0,40 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022. Pada Agustus 2023, TPT laki-laki sebesar 2,95 persen lebih rendah dibanding TPT perempuan yang berjumlah sebesar 3,36 persen. Dibandingkan Agustus 2022 TPT laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,87 persen poin. Sementara itu TPT perempuan mengalami peningkatan sebesar 0,14 persen poin.

Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan (5,26 persen) jauh lebih tinggi dibandingkan TPT di daerah pedesaan (2,40 persen). TPT perkotaan dan pedesaan memiliki pola yang sama dengan TPT Provinsi yaitu turun dibandingkan Agustus 2022 masing-masing sebesar 2,02 persen poin dan 0,01 persen poin.

Tabel 2.1.4. Karakteristik Pengangguran di Provinsi NTT, Agustus 2021-Agustus 2023

Karakteristik Pengangguran	Agustus 2021 (persen)	Agustus 2022 (persen)	Agustus 2023 (persen)	Perubahan Agustus 2021- Agustus 2022 (persen poin)	Perubahan Agustus 2022- Agustus 2023 (persen poin)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,77	3,54	3,14	-0,23	-0,40
TPT Menurut Jenis Kelamin					
- Laki-laki	3,71	3,82	2,95	0,11	-0,87
- Perempuan	3,84	3,22	3,36	0,62	0,14
TPT Menurut Daerah Tempat Tingal					
- Perkotaan	7,88	7,28	5,26	0,60	-2,02
-Pedesaan	2,51	2,41	2,40	0,10	-0,01

Sumber : Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik No. 60/11/53/Th.XXVI, 6 November 2023

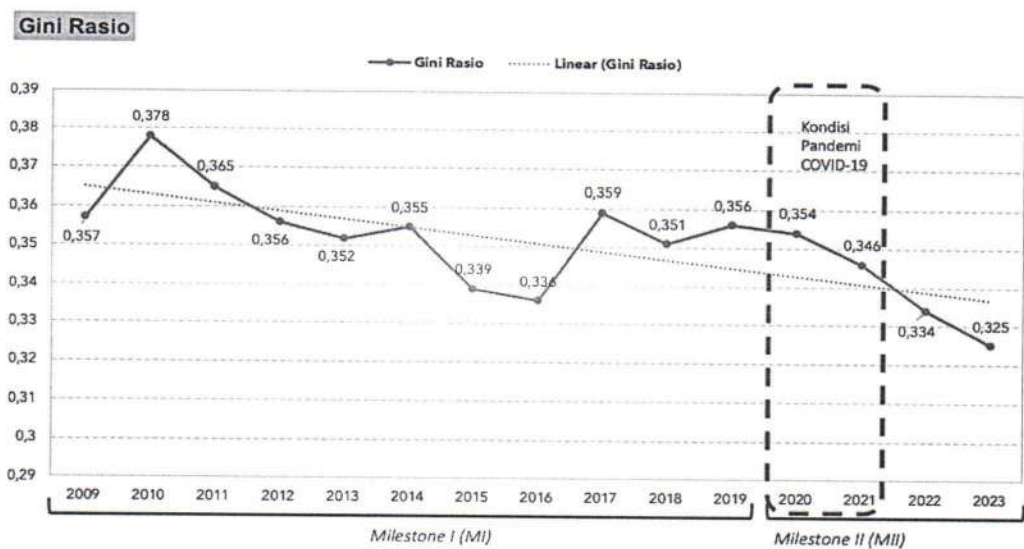
2.1.5. Rasio Gini

Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama.

Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa.

Tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022 relatif stabil. Rasio gini pada Maret 2023 tercatat 0,325 relatif stabil dibanding September 2022 sebesar 0,334. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Grafik 2.1.5. Gini Rasio Provinsi NTT 2009-2023



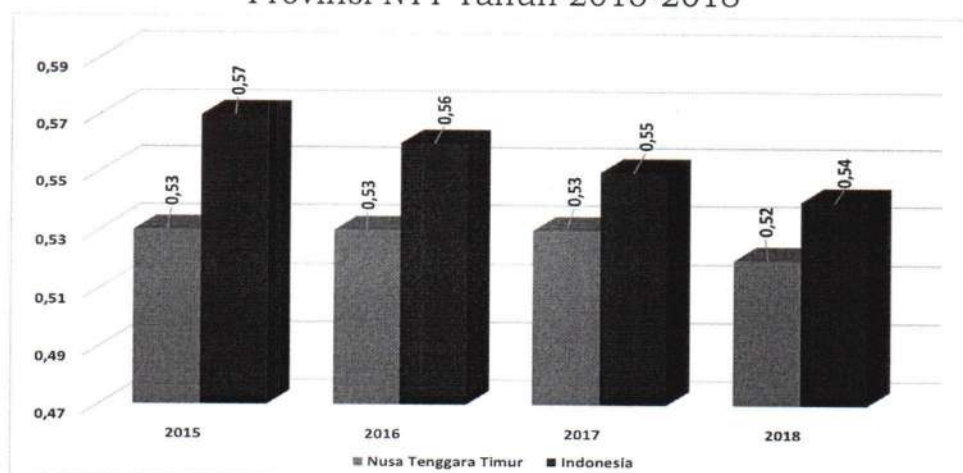
Sumber : BPS Provinsi NTT, 2023 (diolah)

2.1.6. Indeks Modal Manusia

Indeks modal manusia (*human capital index*) merupakan indeks yang mengukur sumber daya manusia yang dapat dicapai oleh seorang anak yang dilahirkan saat ini pada usia 18 tahun, mengingat resiko terhadap pendidikan dan kesehatan yang buruk di negara tempat ia tinggal. Nilai indeks modal manusia Provinsi NTT masih berada di bawah capaian nasional. Sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 berada pada nilai 0,53 dan turun menjadi 0,52 pada Tahun 2018. Artinya setiap anak yang lahir di Provinsi NTT pada Tahun 2018 akan menjadi lebih produktif 52 persen ketika ia tumbuh dewasa dengan catatan mereka menyelesaikan pendidikan dan mendapat akses kesehatan yang baik.

Grafik 2.1.6. Indeks Modal Manusai (*Human Capital Index*)

Provinsi NTT Tahun 2015-2018



Sumber : Kajian Indeks Modal Manusia dan Peranannya Dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2015-2018

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan daerah memiliki peranan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut”. Sedangkan Pengelolaan keuangan daerah merupakan “keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah”.

Gambaran pengelolaan keuangan daerah diperlukan untuk dapat mengetahui kinerja pengelolaan keuangan daerah yang menjadi dasar proyeksi kerangka pendanaan jangka menengah. Kerangka pendanaan jangka menengah inilah yang digunakan dalam merencanakan kebijakan dan program untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan. Hasil kajian keuangan daerah ini merupakan pagu indikatif yang akan menjadi dasar pengalokasian sumber daya sebagai input dalam melaksanakan program. Dengan demikian akan tergambar arah kebijakan, strategi dan program apa yang menjadi prioritas melalui pengalokasian anggaran sebagai langkah operasional dari kebijakan yang telah ditetapkan.

Gambaran pengelolaan keuangan daerah juga menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk menganalisis capaian guna memperoleh proyeksi yang tepat dalam mendanai perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan.

2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. PAD diartikan sebagai penerimaan dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terdiri dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Kinerja pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu tahun 2020-2022 mengalami penurunan sebagai dampak terjadinya pandemi Covid-19 terhadap perekonomian secara global, nasional dan daerah.

Pada tahun 2023, realisasi penerimaan pajak daerah mencapai Rp1.154.822.144.629,00 meningkat sebesar Rp59.320.689.155,00 apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2022. Penerimaan retribusi daerah tahun 2023 sebesar Rp44.202.047.251,00 menurun sebesar Rp17.411.814.776,00 dibanding tahun 2022. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2023 sebesar Rp60.645.290.853,00 meningkat sebesar Rp23.469.310.396,00 dibanding tahun 2022. Demikian juga dengan Lain-lain PAD yang sah untuk tahun 2023 sebesar Rp167.365.684.558,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.080.999.335,00 dibanding tahun 2022.

Pendapatan transfer masih menjadi penopang utama dari sektor pendapatan daerah. Pada Tahun 2023 besarnya pendapatan transfer adalah Rp3.194.678.968.455,00 mengalami peningkatan sebesar Rp140.842.212.594,00 dibanding tahun 2022. Untuk penerimaan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah tahun 2023 yaitu sebesar Rp3.183.251.449,00 menurun sebesar Rp5.715.573.094,00 dibanding tahun 2022, hal ini dapat dilihat pada tabel 2.2.1.

Tabel 2.2.1. Realisasi Pendapatan Provinsi NTT Tahun 2021-2023

KODE	URAIAN	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023
4	PENDAPATAN DAERAH	5.312.446.872.609	4.426.473.562.255	4.624.897.387.195
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.238.032.648.889	1.363.737.981.851	1.427.035.167.291
4.1.01	Pajak Daerah	925.862.559.388	1.095.501.455.474	1.154.822.144.629
4.1.02	Retribusi Daerah	69.890.857.732	61.613.862.027	44.202.047.251
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	64.982.172.050	37.175.980.457	60.645.290.853
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	177.297.059.718	169.446.683.893	167.365.684.558
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	4.000.655.446.445	3.053.836.755.861	3.194.678.968.455
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.000.655.446.445	3.053.836.755.861	3.194.678.968.455
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	73.758.777.275	8.898.824.543	3.183.251.449
4.3.01	Pendapatan Hibah	73.758.777.275	8.898.824.543	3.183.251.449

Sumber : Badan Keuangan Daerah, diolah 2024

2.2.2. Arah Kebijakan Belanja

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah juga merupakan cerminan dari kebijakan anggaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan sebagaimana tertera dalam dokumen perencanaan. Karena itu dengan mencermati realisasi belanja daerah, dapat diketahui sampai sejauh mana penganggaran konsisten dengan perencanaan pembangunan. Kebijakan belanja daerah disesuaikan dengan kewenangan Provinsi sesuai dengan arahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta pendekatan *value for money* dimana prinsip ekonomis, efektivitas dan efisiensi menjadi acuan dalam penyusunan anggaran program dan kegiatan.

Analisis belanja daerah dan selanjutnya analisis pengeluaran pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi kebijakan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2021, 2022 dan 2023 yang digunakan sebagai masukan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Realisasi Belanja Provinsi NTT Tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel 2.2.2. berikut ini :

Tabel 2.2.2. Realisasi Belanja Provinsi NTT Tahun 2021-2023

KODE	URAIAN	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023
5	BELANJA DAERAH	5.508.767.906.133	4.816.652.654.357	4.460.910.047.257
5.1	BELANJA OPERASI	4.061.962.995.626	3.051.851.164.202	3.185.343.321.503
5.1.01	Belanja Pegawai	1.608.464.234.033	1.421.874.102.462	1.511.605.996.659
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.078.288.386.249	1.208.109.064.096	1.207.862.533.807
5.1.03	Belanja Bunga	17.483.698.422	54.539.281.319	62.884.046.386
5.1.05	Belanja Hibah	1.347.483.386.922	335.277.916.325	379.445.844.651
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	10.243.290.000	32.050.800.000	23.544.900.000
5.2	BELANJA MODAL	903.257.622.800	1.216.802.446.597	621.342.023.685
5.2.01	Belanja Modal Tanah	147.952.000	1.050.294.656	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	185.901.613.833	144.284.448.880	193.621.780.165
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	135.344.543.385	141.655.437.253	248.250.770.111
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	572.412.496.697	909.704.835.562	155.271.232.138
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.451.016.885	20.107.430.246	24.198.241.271
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	135.775.036.685	7.228.173.756	707.344.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	135.775.036.685	7.228.173.756	707.344.000
5.4	BELANJA TRANSFER	407.772.251.022	540.770.869.801	653.517.358.069
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	397.772.251.022	527.502.869.801	653.517.358.069
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	10.000.000.000	13.268.000.000	-

Sumber : Badan Keuangan Daerah, diolah 2024

Komponen dalam belanja daerah dibagi lagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Realisasi belanja operasi tahun 2023 yaitu sebesar Rp3.185.343.321.503,00 mengalami peningkatan sebesar Rp133.492.157.301,00 dibandingkan tahun 2022. Realisasi belanja modal tahun 2023 yaitu sebesar Rp621.342.023.685,00 menurun sebesar Rp595.460.422.912,00 dibanding tahun 2022. Realisasi belanja tidak terduga tahun 2023 yaitu sebesar Rp707.344.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp6.520.829.756,00 dibanding tahun 2022. Sedangkan realisasi belanja transfer tahun 2023 yaitu sebesar Rp653.517.358.069,00 mengalami peningkatan sebesar Rp112.746.488.268,00 dibandingkan tahun 2022.

Belanja daerah tahun 2025 diproyeksikan dengan *baseline* penganggaran tahun 2021-2023 yang diarahkan untuk: 1) pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), 2) membiayai kewajiban serta belanja wajib dan mengikat, 3) membiayai program yang akan berdampak pada peningkatan PAD.

Pemenuhan standar pelayanan minimal dilakukan melalui DAU yang sudah diarahkan, untuk memastikan alokasi anggaran secara konsisten dan kontinyu untuk membiayai SPM. Pemenuhan kewajiban serta belanja wajib dan mengikat seperti pembayaran hutang pinjaman daerah, alokasi anggaran untuk menjawab kebijakan pemerintah pusat, belanja gaji ASN, membiayai tugas belajar yang sudah berjalan, membiayai operasional kantor selama 1 tahun. Sedangkan anggaran program yang berdampak pada peningkatan PAD diarahkan untuk optimalisasi dan rehabilitasi yang akan mendatangkan PAD ataupun pengembangan potensi-potensi PAD.

2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan Daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada periode anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit keuangan daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa mendatang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Realisasi Pembiayaan Tahun 2020-2022 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.2.3. Realisasi Pembiayaan Provinsi NTT Tahun 2021-2023

KODE	URAIAN	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023
6	PEMBIAYAAN DAERAH	258.865.991.151	473.213.790.907	(42.776.281.731)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	503.023.089.715	796.167.336.797	222.002.984.475
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	68.383.358.384	62.544.957.627	83.195.862.278
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	136.488.800.000
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	431.234.385.650	730.098.883.256	-
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	3.405.345.681	3.523.495.914	2.318.322.197
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	244.157.098.564	322.953.545.890	264.779.266.206
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	100.000.000.000	240.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	127.300.000.000	14.000.000.000	-
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	114.357.098.564	208.953.545.890	24.779.266.206
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	2.500.000.000	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	244.157.098.564	322.953.545.890	264.779.266.206
	Pembiayaan Netto	258.865.991.151	473.213.790.907	(42.776.281.731)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	62.544.957.627	83.034.698.805	121.211.058.207

Sumber : Badan Keuangan Daerah, diolah 2024

Sepanjang periode 2021-2023, Penerimaan Pembiayaan daerah mengalami fluktuasi setiap tahun. Pada tahun 2023 realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp222.002.984.475,00 mengalami penurunan sebesar Rp574.164.352.322,00 dibanding tahun 2022.

Demikian pula pada komponen pengeluaran pembiayaan mengalami fluktuasi setiap tahun. Pada Tahun 2023 realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp264.779.266.206,00 mengalami penurunan sebesar Rp58.174.279.684,00 dibandingkan tahun 2022.